

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik materil dan mental spriritual, antara lain melalui pembangunan di bidang Agama yang mencangkup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang beragama Islam dan yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber yang potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat hal ini di perkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No.581 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Sedangkan Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan, serta ketaqwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang-orang kaya.

Zakat adalah ibadah (*maaliyyahijtima'iyyah*) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga, sehingga keberadaannya dianggap sebagai (*ma'luunminad-diinbidh-dharuurah*) atau diketahui secara otomatis adanya bagian mutlak dari keislamaan seseorang.<sup>1</sup>

Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi di mana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang-orang kaya masalah bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang-orang kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang.<sup>2</sup>

Status kedudukan zakat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa ibadah zakat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang berakal sehat dan memiliki harta yang telah mencapai nishab. Nishab artinya harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai ketentuan syar'a.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, Jakarta: PT Grasindo, hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.* hal. 2.

<sup>3</sup> Amar Faozan, 2011, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Hal. 7.

Sedangkan perintah-perintah mengenai wajib zakat sudah di atur di dalam Al-Quran sebagaimana Firman Allah Swt :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan<sup>4</sup> dan mensucikan<sup>5</sup> mereka, dan berdo’alah untuk mereka sesungguhnya do’amu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, Allah Swt Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah : 103).

Maknanya adalah, ambillah wahai Rasul sebagian harta mereka orang-orang yang beriman sebagai sedekah yang telah ditentukan ukuran-ukurannya, seperti zakat wajib atau sedekah yang tidak ditentukan ukuran-ukurannya.<sup>6</sup>

Syarat-syarat sah pelaksanaan zakat dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

#### 1. Niat

Disyariatkan pula niat ketika menunaikan zakat karena salah satu syarat berzakat yaitu didasari dengan niat dan rasa ikhlas. Ketika seseorang membayar zakat, maka dia hanya mengharapkan ridha Allah Swt sekaligus mencari pahala dari amalannya tersebut. Ia pun meniatkan

<sup>4</sup> Membersihkan artinya: zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

<sup>5</sup> Mensucikan artinya: zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta mereka.

<sup>6</sup> Syaikh As-SayyidSabiq. 2005, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, hal. 4.

dalam hati bahwa yang dia keluarkan adalah zakat yang diwajibkan atasnya. Sebagaimana Allah Swt Berfirman :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya : “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ihklas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan demikian itulah agama yang lurus benar.”<sup>7</sup> (Q.S. Al-Bayyinah : 5).<sup>8</sup>

2. Menyerahkan harta yang dizakati kepada *mustahiqq*-nya, bukan kepada yang lainnya.
3. Harta yang dikeluarkan zakatnya adalah harta yang wajib dizakati.<sup>9</sup>

Jenis-jenis harta (maal) yang wajib dizakatkan, pada umumnya dalam fiqh Islam ialah harta kekayaan yang wajib dizakati atau dikeluarkan zakatnya digolongkan menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. Emas, perak dan uang simpanan.
- b. Barang yang diperdagangkan atau harta perniagaan.
- c. Hasil pertanian.
- d. Hasil peternakan.
- e. Hasil tambang dan barang temuan.

<sup>7</sup> Agama yang lurus artinya: jauh dari syirik dan jauh dari kesesatan.

<sup>8</sup> Diriwayatkan oleh :

Al-Bukhari, dengan maknanya : Kitab *al Aiman wan Nudzuur* (VIII/177), bab *Idzaa Nadzara Haalafa la Yukallimu Insaan fi Jaahiliyyah Tsumma Aslama*, Muslim : Kitab *ash-Shiyaam*, Bab *Qadhaa-ish Shiyaam 'anil Mayyit* (II/804, NO. 155).

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayly, 1995, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Daral-fikr, Damaskus, hal. 118.

f. Zakat profesi, saham, rezeki tidak terduga, undian, kuis berhadiah.<sup>10</sup>

Adapun ancaman-ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat sebagaimana Firman Allah Swt di bawah ini :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآْكُلُوا أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تُحْمَى  
عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا  
كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Swt. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah Swt, maka berikanlah kabar gembira pada mereka bahwa mereka mendapat azab yang pedih (ingatlah) pada hari emas dan perak di panaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan pada mereka, inilah hartamu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.” (Q.S. At-Taubah: 34-35).

Yang ke dua Allah Swt Berfirman Q.S. Ali-Imran: 180 yang berbunyi :

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ  
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾﴾

<sup>10</sup> Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat Dan Waqaf*, Op.Cit. hal. 24-25.

Artinya: *“Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepada Allah Swt kepada mereka dan karunianya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah-lah warisan apa yang ada di langit dan bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”* (Q.S. Ali-Imran: 180).<sup>11</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas sudah sangat jelas bahwa zakat adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi bagi setiap muslim yang mempunyai harta yang lebih, perintah itu secara langsung diwahyukan Allah Swt kepada manusia melalui Rasul-rasul agar membayar zakat. Rasullulah Saw mengisyaratkan bahwa siapa yang menunaikan sholat tetapi tidak menunaikan zakat maka sholatnya adalah sia-sia, Khalifah Abu Bakar As-Shidiq pula telah menggunakan paksaan ke atas mereka yang enggan membayar zakat kepada kerajaan.<sup>12</sup>

Di sisi lain pemberian zakat secara inovatif perlu di laksanakan oleh lembaga amil zakat, misalnya pemberian zakat bukan untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif saja, tetapi ada beberapa bagian dari dana zakat yang dapat dijadikan modal untuk dipergunakan sebagai bekal bekerja atau mencari nafkah bagi penerima zakat yang mempunyai keterampilan tertentu, misalnya alat-alat pertukangan, bangunan, elektronik, otomotif, menjahit, dan sebagainya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Syaikh As-Sayyid Sabiq, 2005, *Panduan Zakat Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Op.Cit. hal. 11.

<sup>12</sup> Beberapa Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat adalah, *Q.S. Al-Baqarah: 110, Q.S. Al-Mu'minin: 1-6, Q.S. Adz Dzariyaat: 19* dan *Q.S. Al-Ma'aarij: 24-24*.

<sup>13</sup> Tegar Basuki, 2005, *Potensi Zakat Hasil Bumi Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Malang: Tabloid Sinar Tani. Hal. 3.

Pendayagunaan zakat akan menjadi optimal apabila mendapatkan dukungan, dorongan dari pengelolaan zakat yang secara baik bagi amil zakat sebagai orang pengelola zakat. Serta harus adanya kerja sama dan komunikasi selalu demi terciptanya kelancaran pendayagunaan zakat serta amil zakat harus mempunyai rasa tanggung jawab sebagai pengelola zakat yang mana harus dilakukan secara intensif, berkala dan harus berdasarkan Undang-Undang No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga mustahik sebagai penerima zakat dapat memanfaatkan zakat secara optimal yaitu memanfaatkan zakat dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis dalam hal ini terdorong untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAYAGUNAAN ZAKAT BERDASARKAN UU NO 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan)**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah ini sebagai berikut :

- a. Sumber-Sumber Bantuan Zakat dan Dana Yang Diperoleh Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, serta Prosedur Pengumpulannya dan Pendistribusiannya ?
- b. Pendayagunaan Zakat Yang Dilakukan Oleh Amil Zakat Kepada Mustahik, serta Besar dan Zakat Yang Diperoleh Mustahik ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini, serta menghindarinya apabila ada kekeliruan masuknya hukum yang sama sekali tidak berkaitan dengan penelitian ini serta menghindarinya berbagai perluasan sebagai dampak luasnya ruang lingkup yang akan dikaji dan agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di teliti serta tujuan yang akan dicapai, maka penulis melakukan pembatasan terhadap Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Studi Kasus Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut :

- a. Untuk mengetahui Sumber-Sumber Bantuan Zakat dan Dana Yang Diperoleh Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, serta Prosedur Pengumpulannya dan Pendistribusiannya.
- b. Untuk mengetahui Pendayagunaan Zakat Yang Dilakukan Oleh Amil Zakat Kepada Mustahik, serta Besar dan Zakat Yang Diperoleh Mustahik.
- c. Agar mahasiswa mengetahui bagaimana cara pendayagunaan zakat yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan supaya dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman tambahan, pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian di bidang zakat khususnya

##### **2. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat yang berhubungan dan berkepentingan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, agar kemudian dapat dijadikan sebagai rujukan

referensi khususnya dalam bidang Pengelolaan Zakat Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dapat digolongkan dalam penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang manusia keadaan atau gejala-gejala yang lain.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penulis akan berusaha memaparkan dan melakukan kajian-kajian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan).

### **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan perumusan-perumusan masalah dan tujuan penelitian yang penulis kaji, maka metode pendekatan menggunakan dengan metode pendekatan secara rasional yang berarti memberikan kerangka berfikir yang kohonen dan logis. Dan metode pendekatan secara empiris yang berarti memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Dengan cara ilmiah itu diharapkan data yang akan di dapatkan nanti adalah data yang objektif, valid, dan reliable. Objektif berarti semua orang akan memberikan penafsiran yang sama, valid berarti adanya ketepatan antara data yang terkumpul oleh peneliti dengan data yang terjadi pada objek yang sesungguhnya, dan reliable berarti adanya ketepatan, keajekan, konsisten

---

<sup>14</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal. 3.

data yang didapat dari waktu ke waktu.<sup>15</sup> Sehingga dapat diketahui bagaimana. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Zakat Berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan).

### **G. Jenis Data**

Data yang terkumpul lalu diolah. Pertama-tama data itu diseleksi atas dasar rehabilitasi dan validitasnya. Data yang rendah reliabilitasnya dan validitasnya, data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substansi. Selanjutnya data yang telah lulus dalam seleksi itu lalu diatur dalam table, matriks, dan lain-lain agar memudahkan pengolahan selanjutnya.<sup>16</sup> Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh melalui penelitian pada Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan.

#### **2. Data Sekunder**

Merupakan sejumlah kata yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, hasil seminar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

---

<sup>15</sup> Sugiono, 1994, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, hal. 1.

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 49.

## **H. Lokasi Penelitian**

Yang menjadi tempat dan objek penelitian adalah Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan.

## **I. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi antara pewawancara menyampaikan pertanyaan responden, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki, kemudian mencatatnya.<sup>17</sup>

Wawancara yang penulis lakukan adalah melakukan sistem tanya jawab dengan narasumber yang terkait di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan.

### **2. Dokumentasi**

Yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang tersedia tentunya data tersebut yang mengacu pada dokumen-dokumen yang ada di Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan.

## **J. Penelitian Pustaka**

Teknik pustaka ini sangat penting dan berpengaruh karena sebagai dasar teori yang akan dikaji dan sebagai pendukung. Di dalam penelitian ini penulis melakukan studi kepustakaan melalui membaca dan mempelajari

---

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Lp3es, anggota Ikapi, hal. 192.

buku-buku literatur, naskah-naskah serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

#### **K. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.<sup>19</sup>

#### **L. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan berisi tentang: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang: pengertian zakat, dasar hukum zakat, hikmah zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, jenis dan nishab

---

<sup>18</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: Lp3es, anggota Ikapi, Op.Cit. hal. 263.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV Rajawali, hal. 13.

zakat, golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat, golongan-golongan orang yang tidak berhak menerima zakat. pengelolaan zakat Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, salah satu perbedaan Undang-Undang 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang 38 Tahun 1999.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang: sumber-sumber bantuan zakat dan dana yang diperoleh Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, serta prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, struktur kepengurusan dan Tugas Lembaga Pendayagunaan Zakat Cabang Magetan, tabel donatur-donatur zakat Cabang Magetan, pengumpulan zakat oleh Amil, pendistribusian zakat oleh Amil, tabel Mustahik yang memperoleh zakat, pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Amil zakat kepada Mustahik, serta besar dan zakat yang diperoleh Mustahik.

BAB IV Penutup berisi tentang: Kesimpulan dan Saran.